

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini untuk menguji *Environmental Social and Governance performance*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel data sebanyak 414 terpilih dari 234 perusahaan manufaktur 2021-2023. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel *Environmental Social and Governance performance* tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kepemilikan keluarga dapat memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada proses penelitian yang telah dilakukan masih memiliki banyak kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjadi bahan pembelajaran serta menambah ilmu bagi peneliti. Maka dari itu peneliti berharap untuk dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk peneliti berikutnya. Berikut merupakan beberapa keterbatasan:

1. Objek penelitian yang digunakan hanya perusahaan sektor manufaktur kurun waktu 3 tahun yaitu 2021-2023
2. Perusahaan sektor manufaktur di Indonesia yang digunakan sebagai sampel penelitian masih belum banyak yang konsisten dalam menerbitkan sustainability report.
3. Pengukuran variabel *Environmental Social and Governance performance* menggunakan jumlah indeks dari laporan keberlanjutan, sehingga kemungkinan menimbulkan persepsi bias, karena subyektif dari peneliti untuk menentukan indeks tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah disajikan sebelumnya, peneliti juga merangkum saran atau masukan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti perusahaan pada sektor lain seperti sektor keuangan atau non keuangan agar memiliki cakupan sektor penelitian yang lebih luas.
2. Perusahaan diharapkan lebih transparan dan konsisten dalam menerbitkan serta menerapkan aspek-aspek ESG pada laporan keberlanjutan.
3. Bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyusunan regulasi dan pengawasan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mendorong implementasi prinsip ESG di perusahaan. Kebijakan ini dapat mencakup penguatan kewajiban perusahaan untuk pengungkapan penerapan ESG dalam laporan keberlanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif atau akses ke pembiayaan hijau bagi perusahaan yang secara aktif meningkatkan penerapan ESG dan transparansi dalam pelaporannya. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis dan masyarakat umum.